

Analisis keuangan sub dolog
di kecamatan Mojolaban kabupaten Sukoharjo
(kasus UPGB Mojolaban, kabupaten Sukoharjo, propinsi Jawa Tengah)

Oleh :

Sadino

H 1301040

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebagai negara agraris dimana sebagian besar rakyatnya terdiri atas petani yang hidup di daerah pedesaan, maka sektor pertanian yang meliputi berbagai jenis usaha tani tidak dapat dipisahkan dari petani padi yang memberikan andil besar dalam usaha pemenuhan swasembada sembilan bahan pokok.

Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yakni antara 6,5 % sampai 6,9 % per tahunnya. Dari segi teori pertumbuhan ekonomi makro yang relatif tinggi tersebut diharapkan pula akan memperbaiki kinerja sektor pertanian Indonesia, serta tingkat kesejahteraan masyarakat pertanian Indonesia. (Harian Umum Kompas , 2007)

Salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengetahui tinggi rendahnya kesejahteraan petani adalah nilai tukar produk pertanian. BULOG sebagai lembaga publik yang mengatur mekanisme pembelian dan penyaluran bahan pangan kepada masyarakat harus dijalankan sesuai dengan peran dan fungsinya. Semakin efektif peran BULOG dalam mengendalikan harga bahan

pangan di masyarakat menjadi indikasi suksesnya BULOG, semakin tinggi nilai tukar produk pertanian, semakin tinggi kesejahteraan para petani. Sebaliknya semakin rendah nilai tukar produk pertanian semakin rendah kesejahteraan petani. Di Indonesia nilai tukar produk pertanian petani mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Harga yang diterima oleh petani dari produk hasil pertanian mereka, khususnya produk dari subsektor pertanian yaitu padi, tidak sebanding dengan harga-harga yang dibayarkan petani baik untuk konsumsi maupun untuk keperluan usaha tani. Harga padi diatur oleh pemerintah agar harga beras di Indonesia dapat dijangkau oleh semua masyarakat Indonesia. Setiap tahun pemerintah menentukan harga gabah, namun setiap tahun pula subsidi pemerintah terhadap harga beberapa jenis saprodi dikurangi. Akibatnya memang menjadikan para petani harus membayar keperluan mereka lebih dari harga dasar produk pertanian mereka.

Bulog (*Badan Urusan Logistik*) berikut aparat di daerah yaitu Dolog (*Depot Logistik*) di tingkat propinsi, adapun di tingkat karesidenan/kabupaten yaitu Sub Dolog dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 12 th. 1969. Adapun tugas sub dolog yaitu mempertahankan harga dasar yang ditetapkan pemerintah bagi petani, hal ini dengan tujuan memberikan imbalan yang layak untuk meningkatkan pendapatan petani dan memberikan jaminan pemasaran bagi petani produsen, tugas yang kedua mempertahankan tingkat harga penjualan tertinggi bagi para konsumen dengan tujuan memberikan jaminan harga yang layak bagi konsumen sesuai dengan harga beli, membatasi serta mengurangi kemungkinan gejolak harga di pasaran. Sub Dolog merupakan suatu badan pemerintah yang bergerak di bidang logistik yang menyelenggarakan administrasi keuangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya para petani supaya dalam meningkatkan produksi pangan lebih meningkat lagi di masa yang akan datang. (Agus Saifullah, 2001).

Sepanjang sejarahnya dalam melaksanakan tugas publik Perum BULOG senantiasa mengutamakan pembelian gabah dan beras dari petani dalam negeri. Pembelian dari luar negeri baru akan ditempuh apabila

pembelian dari dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan. Sesuai tugas dan fungsinya, Perum BULOG hanya memberikan gambaran situasi perberasan berdasarkan kegiatan operasional dan analisis situasi pangan, sebagai berikut :

1. Situasi Pasar Beras Dunia

Situasi pasar beras dunia saat ini menunjukkan stok yang menipis, sehingga harga relatif tinggi. Hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah pada sebagian negara produsen seperti Thailand untuk melakukan intervensi pembelian beras, sehingga meskipun terjadi kelebihan produksi harganya di pasar dunia tetap tinggi, disamping terjadinya penurunan produksi akibat serangan hama di beberapa negara produsen lain seperti Vietnam.

2. Produksi Padi dan Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri

Selama lima tahun terakhir, jumlah pengadaan gabah dan beras oleh Perum BULOG berkisar antara 1,5 – 2,1 juta ton setara beras. Pengadaan gabah dan beras oleh Perum BULOG diutamakan dalam bentuk gabah sebagai produk yang paling dekat diproduksi petani.

3. Harga Gabah Petani

Berdasarkan laporan BPS pada bulan Agustus 2006, harga GKP rata-rata adalah Rp. 2.163,31/kg atau 25,05% diatas HPP Inpres No. 13/2005. Posisi ini relatif lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2005, 2004 maupun 2003. Perkembangan harga gabah kering panen dapat dilihat pada Tabel 1 :

Tabel 1. Perkembangan Harga Gabah Kering Panen (GKP) 2002 - 2006

Bulan	GKP (Rp/kg)			
	2003	2004	2005	2006
Januari	1.278,10	1.313,88	1.491,10	2.038,66
Februari	1.296,28	1.228,20	1.585,69	2.066,52
Maret	1.257,92	1.138,52	1.435,55	1.837,14
April	1.195,41	1.188,68	1.393,68	1.899,94
Mei	1.243,89	1.260,99	1.393,42	2.052,33
Juni	1.217,66	1.262,37	1.468,26	2.140,07
Juli	1.174,21	1.230,64	1.482,54	2.051,45
Agustus	1.268,28	1.235,77	1.552,09	2.163,31
Rata2 Jan - Agst	1.241,47	1.232,38	1.472,79	2.031,18
HPP	1.230,00	1.230,00	1.330,00	1.730,00

% Agst thd HPP	3,11	0,47	18,70	25,05
-----------------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Sumber : BPS, 2006

Berdasarkan *trend* harga GKP selama ini, harga GKP dan beras mengikuti trend harga dasar/HPP. Dengan situasi perberasan seperti ini posisi stok nasional yang terdiri dari stok beras Perum BULOG dan Cadangan Beras Pemerintah pada akhir tahun 2006 diperkirakan hanya 530 ribu ton, sedangkan jumlah ideal cadangan beras nasional selama satu tahun adalah 1 juta ton. Hal ini tentu akan menyulitkan Pemerintah dalam melakukan pengelolaan stok dan penyebaran secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Pengadaan beras di Indonesia masih didukung oleh impor dari luar negeri. Hingga kini Indonesia masih mengimpor beras guna memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Hal ini dikarenakan produksi beras di dalam negeri belum mampu sepenuhnya untuk mencukupi kebutuhan konsumsi beras yang terus meningkat, maka dapat dimaklumi apabila Pemerintah kemudian memutuskan untuk impor dan Pemerintah menugaskan Perum BULOG untuk melaksanakan impor melalui mekanisme tender terbuka.

Dengan memperhatikan keberadaan Sub Dolog sebagai badan usaha seperti yang tercantum dalam Keputusan Presiden No. 12 th. 1969, dukungan Sub Dolog di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dalam perekonomian kerakyatan menjadi penting manakala kinerja dari Sub Dolog itu baik dan daerah tersebut merasa terbantu. Menurut Rayburn (1999), menekankan tentang pentingnya evaluasi kinerja keuangan yang terfokus pada jangka waktu yang singkat maupun yang panjang. Untuk itulah kiranya penting diukur kinerja keuangan Sub Dolog, karena dari hasil pengukurannya dapat diketahui apakah Sub Dolog dalam kaitannya sebagai badan usaha tersebut sudah menguntungkan bagi petani atau belum.

B. Perumusan Masalah

Sub Dolog sebagai badan usaha diharapkan mampu meningkatkan potensi ekonomi masyarakat, khususnya petani. Pencapaian tujuan Sub Dolog untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani harus didukung oleh manajemen yang baik. Hubungan timbal balik antara manajer dengan para karyawan Sub Dolog secara efektif merupakan salah satu faktor internal yang sangat mendukung keberhasilan Sub Dolog dalam mencapai tujuannya. Hasil manajemen yang baik salah satunya dapat dilihat dari keuangan Sub Dolog. Kondisi keuangan tersebut dapat dianalisis menggunakan analisis keuangan dengan melihat setiap pos-pos yang ada dalam laporan neraca keuangan Sub Dolog seperti aktiva tetap, total aktiva, modal sendiri, penjualan dan sisa hasil usaha mengalami perkembangan atau tidak. Kondisi keuangan yang baik akan menunjukkan usaha-usaha Sub Dolog telah dilakukan secara efisien dan memungkinkan Sub Dolog dapat melakukan perencanaan yang matang dimasa yang akan mendatang.

Berdasarkan uraian tersebut permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi keuangan Sub Dolog di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo ?
2. Bagaimana perkembangan aktiva tetap, total aktiva, modal sendiri, penjualan dan SHU dalam neraca pada Sub Dolog di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji kondisi keuangan Sub Dolog di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.
2. Mengkaji perkembangan aktiva tetap, total aktiva, modal sendiri, penjualan dan SHU dalam neraca pada Sub Dolog di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang sangat berharga dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh derajat Sarjana Pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam hal pertimbangan pembuatan kebijakan dan pemberian fasilitas yang nantinya akan berpengaruh dengan kondisi perekonomian kabupaten Sukoharjo secara makro.
3. Bagi pihak manajemen Sub Dolog, penelitian ini diharapkan sebagai sumbang saran untuk memastikan tingkat keberhasilan usaha dan dasar perencanaan strategi operasional ditahun yang akan datang.
4. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai informasi atau bahan pembanding bagi permasalahan yang sama.